

TANTANGAN DAN KESELARASAN AGAMA DAN PANCASILA

Oleh: Sudarnoto Abdul Hakim

A. Problem/Tantangan

Ada kecenderungan kuat akhir akhir ini berbagai elemen masyarakat menyeret agama dalam pusaran kontestasi politik. Agama atau simbol simbol agama dijadikan sebagai sumber legitimasi, instrumen dan komoditas politik. Bahkan, agama digunakan untuk menyerang siapa saja yang diyakini berbeda haluan. Jadi, politisasi agama, penyederhanaan keluhuran agama menjadi sekedar institusi, komoditi agama tak terelakkan. Hemat penulis, ini realitas yang sangat memprihatinkan karena justru akan menimbulkan benturan di tengah masyarakat yang tanda-tandanya sudah terasa. Dengan demikian, agama menjadi tidak fungsional dalam kehidupan.

Ada sejumlah realitas yang menggambarkan terjadinya penyelewengan dan serangan terhadap Pancasila antara lain ialah:

Pertama, Ketamakan (greediness). Setidak tidaknya bangsa Indonesia Pasca reformasi menghadapi masalah yang menurut hemat penulis sangat serius yaitu begitu masifnya katamakan, kerakusan. Hal ini antara lain dikarenakan semakin menguatnya arus pragmatisme yang kemudian mendorong sikap Selfish dan egoisme sektoral. "Sepanjang kepentingan personal dan kelompok terpenuhi, maka selesailah urusan," begitulah spiritnya. Alih-alih memberikan perhatian dan berkontribusi untuk kepentingan bersama yang lebih besar, kesibukan yang secara terus menerus dilakukan adalah menggaruk keuntungan-keuntungan finansial sebanyak-banyaknya. Orang berlomba memperebutkan pundi-pundi ekonomi dengan menabrak hukum dan norma-norma kewajaran. Ketamakan ini terjadi secara sistemik. Banyak faktor struktural mengapa korupsi itu merajalela antara lain lemahnya law enforcement karena memang adanya upaya-upaya memperlemah KPK misalnya. Ketamakan jamaah ini melibatkan para pejabat di banyak lembaga karena memang merekalah yang memiliki kekuasaan dan bisa mengakses sumber-sumber proyek dan ekonomi. Sementara mereka yang tidak mempunyai kekuasaan, cenderung mencuri, menjambret, merampok atau menggarong secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Bedanya, segmen masyarakat ini bukan karena ketamakan akan tetapi kemiskinan yang mendera. Bersyukur pemerintah dan kekuatan civil society muslim seperti Muhammadiyah dan NU misalnya cukup serius menghadapi ini meskipun tentu saja tidak mudah.

Kedua, violent and extremism yaitu tindakan kejahatan atau kekerasan yang dilakukan tidak saja oleh individu orang perorang akan tetapi juga oleh kelompok antara lain dengan mengatas namakan agama, sosial, politik dan stabilitas atau keamanan. Teror yang dilakukan berkali-kali dan bagaimana penanganan terorisme dilakukan memberikan gambaran jelas bahwa "pendekatan kekerasan" (Irhabiy dan Qitaliy) masih sangat mewarnai perjalanan kebangsaan kita. Narasi gegabah yang sering dimunculkan bahwa terorisme ada hubungannya dengan agama atau ormas keagamaan tertentu menurut hemat penulis juga salah satu bentuk teror yang tidak sepatutnya dilakukan. Terorisme dan ekstrimisme adalah musuh bersama, musuh kemanusiaan. Ini bukan soal agama, akan tetapi soal

kemanusiaan, soal ketidakadilan, soal hilangnya trust publik terhadap elit politik. Kekerasan itu tentu tidak saja fisik sifatnya, akan tetapi juga kekerasan verbal/oral dan kekerasan tertulis (written). Terorisme ini paling tidak meninggalkan efek psikologis, sosial dan politik yang sistemik; disintegrasi menjadi ancaman bagi kehidupan sosial dan politik.

Ketiga, deteriorasi ideologis. Pancasila sebagai dasar negara dan filsafat bangsa yang telah dirumuskan dan disepakati melalui proses yang tidak mudah, digerogeti oleh paham paham dan gerakan lokal dan transnasional. Paham dan gerakan separatisme, paham hardliners, kemunculan nabi palsu, misalnya, adalah gerakan atau paham ideologis lokal yang tidak sekedar bersebarangan akan tetapi bahkan merusak Pancasila dan memicu ketidaktenteraman, disharmoni dan disintegrasi. Kemudian, ideologi-ideologi atau paham transnasional yang antara lain disemai secara masif dan ekstensif melalui berbagai media sosial seperti hedonisme, materialisme, ateisme liberalisme, sekularisme, permisivisme, ekstrimisme juga menjadi ancaman bagi Pancasila. Paham dan ideologi tersebut, merupakan sebagian dari disrupsi kecanggihan digital atau revolusi 4.0 yang saat ini tanpa batas siapapun bisa mengakses bahkan tak terbendung oleh negara sekalipun. Sudah nampak secara kasat mata bahwa pola hidup atau life style masyarakat banyak yang telah dipengaruhi oleh hedonisme, materialisme, sekularisme, permisivisme dan liberalisme. Di pihak lain, dengan menggunakan dalil-dalil kesucian dan simbol-simbol agama ekstrimisme melakukan aksi-aksinya mendestruksi/mendekonstruksi Pancasila sekaligus merusak prinsip-prinsip "kemanusiaan yang adil dan beradab." Sikap ini sangat berhimpitan dengan munculnya intoleransi beragama dan menurunnya indeks demokrasi substansial. Dan intoleransi ini tercermin dalam sikap kebencian dan permusuhan terhadap segala hal yang berada di luar kelompok Islam transnasional dan bahkan semakin kuat ketika mendapatkan landasan teologis dari nash-nash ajaran Islam yang mereka pahami secara serampangan. Dari situ muncullah cita-cita politik sektarian dan politik populisme yang sangat kuat mengusung identitas Islam. Menurut pandangan kaum populis ini setiap sistem politik yang tidak sesuai dengan pemahaman mereka disebut thoghut, kafir, dan anti-Islam dan harus diganti.

Uraian di atas, diperkuat dengan hasil survey yang dilakukan oleh SMRC dan Alvara. Survey ini memperlihatkan bahwa ideologi Islam transnasional sangat dominan memengaruhi sikap dan pandangan sebagian kecil masyarakat terhadap Pancasila dan NKRI sebagai ideologi dan bentuk negara. Sekelompok masyarakat itu antara lain adalah Al-Ikhwanu al-Muslimun (IM) yang sejak 1980-an masuk ke Indonesia dan berkembang di kampus-kampus negeri serta berkeinginan mendirikan negara Islam. Selain IM, ada Hizbut Tahrir (HT) yang masuk Indonesia pada kurun waktu yang sama, berkembang di kampus-kampus negeri, dan bercita-cita mendirikan khilafah Islamiyah. Dari pengaruh mereka—IM dan HT—sekarang kita bisa melihat gambaran sikap dan pandangan sebagian kecil umat Islam di Indonesia yang menginginkan perubahan dasar dan bentuk negara. Setidaknya itulah yang tercermin dalam survei SMRC dan Alvara.

Keempat, krisis kepemimpinan. Semakin menuanya bangsa kita ternyata belum sepenuhnya diimbangi dengan ketersediaan "pemimpin bangsa yang sejati" yang memiliki kemampuan mengikuti sifat-sifat wajib Rasulullah: Sidiq, Amanah, Tabligh dan Fatonah. Yang kita miliki barulah pimpinan atau pengurus kekuatan politik, birokrat dan pejabat tinggi, aktivis, petinggi TNI Polri, ketua dan anggauta DPR MPR, tokoh dan pengurus Ormas keagamaan dan kemasyarakatan. Lalu, yang kita punya baru

pimpinan kampus, akademisi, intelektual, peneliti. Kita belum memiliki pemimpin yang secara politik berpengaruh, secara moral teruji termasuk yang berkomitmen tinggi dan memiliki kekuatan untuk menerapkan sifat-sifat wajib Rasul di atas, secara kultural bisa diterima oleh semua elemen masyarakat dan secara keagamaan tak diragukan dan visioner membawa Indonesia ke depan yang cerah. Tidak gampang memang untuk memenuhi kebutuhan profil pemimpin profetik seperti di atas.

B. Agama yang Mencerahkan

Tak bisa diabaikan bahwa agama khususnya Islam sebenarnya telah menyediakan nilai-nilai keluhuran dan prinsip-prinsip moral yang agung yang sangat bermanfaat bagi upaya penguatan kehidupan. Di tangan umat beragama keagungan agama haruslah menerangi, menginspirasi dan mendorong masyarakat untuk bekerja keras meningkatkan kualitas demokrasi, keadilan, kesejajaran, clean government, good governance, menghormati perbedaan, menjaga dan melindungi harkat dan martabat serta kedaulatan secara jenuin. Namun memang tidak bisa dipungkiri kenyataan bahwa dalam beberapa kasus agama telah dimanipulasi atau dimanfaatkan misalnya sebagai agama perlawanan kepada siapa saja yang dianggap berbeda. Inilah yang kemudian memunculkan ekstrimisme atas nama dan dengan menggunakan simbol-simbol agama yang justru menghancurkan kemanusiaan.

Negara Pancasila adalah negara yang menempatkan agama sebagai bagian penting dari pandangan hidup dan filsafat bangsa. Hal ini tercantum dalam Sila pertama dari Pancasila. Agama memang tidak menjadi dasar ideologi karena telah disepakati Indonesia bukan negara agama. Akan tetapi Indonesia juga bukan sekular. Hubungan agama dengan Pancasila yang sangat khas ini telah mendorong dan menempatkan Indonesia sebagai negara yang menganut Middle Path. Begitu juga, agama, Islam terutama, yang dianut bangsa Indonesia adalah agama yang menawarkan Middle Path atau Wasathiyah. Wasathiyah inilah yang diyakini menjadi jalan terbaik antara lain dalam menyelesaikan berbagai benturan sosial, politik dan ideologi yang melanda masyarakat dunia; menyelesaikan krisis kemanusiaan dan lingkungan. Tak ada cara lain bagi seluruh warga bangsa kecuali secara terus menerus dan konsisten memperjuangkan agar seluruh bangsa Indonesia menggali keagungan dan menerapkan ajaran prinsipal agama untuk bangsa yang maju dan berkeadaban. Misi pencerahan agama haruslah menjadi kesadaran kolektif bangsa ini sehingga agama secara substansial benar-benar terwujud dalam kehidupan nyata, untuk Indonesia yang berkemajuan. Sudah waktunya memang seluruh warga agama dan bangsa meningkatkan kerja keras dan cerdasnya untuk mengajak seluruh kekuatan agama, masyarakat dan kekuatan civil society lainnya menjadikan Indonesia benar benar sebagai rumah kebangsaan bersama, bukan rumah kelompok tertentu. Rongrongan ideologi Islam transnasional terhadap Pancasila hari ini semakin nyata. Karena itu sebagai bangsa, kita harus mampu merawat dan menjadikan Pancasila sebagai "kalimatun sawa' " atau titik temu semua suku, agama, etnis, ras dan budaya yang berbeda-beda. Agama-agama haruslah ditempatkan dalam bingkai integrasi nasional dan kebangsaan.

Penulis adalah Wakil Ketua Majelis Diktilitbang PPM, Associate Professor UIN Jakarta dan Asisten Staf Khusus Presiden RI.